

KOMUNIKASI LINTAS BUDAYA (PENERAPAN KONSEP RUKUN DAN PRINSIP HORMAT)

oleh Suharti
FBS Universitas Negeri Yogyakarta

Abstract

Global communication has caused local dialects, local literatures and local cultures in Indonesia to undergo regression because of there being a multicultural conditions. This problems need to be solved by way of creating a uniform point of view. The effecttiveness of such uniformity is what the nation needs to saveguard solidarity. In order to effect uniformity, cross cultural communication, based on mutual respect and harmony, is deemed necessary.

Key Words: Based on Mutual Respect and Harmony

A. Pendahuluan

Bahasa, sastra, dan budaya daerah merupakan aset bangsa. Bahasa merupakan wujud kebudayaan paling awal yang digunakan manusia sebagai alat komunikasi, begitu pula sastra dan wujud budaya lainnya sampai pada jaman kejayaannya. Selain bahasa berfungsi sebagai alat komunikasi, bahasa juga berfungsi sebagai perekam budaya sekaligus sebagai produk budaya itu sendiri. Berbagai macam pengalaman dan pemikiran dari suatu bangsa tercermin dalam bahasanya, misalnya, dalam hal cara bercocok tanam, cara berbusana, cara mendidik anak, cara mengobati orang sakit dan hidup sehat jiwa dan raga, dan keinginan-keinginannya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa segala pengalaman hidup filsafat hidupnya dicurahkan dalam bentuk bahasa maka dapat dikatakan juga bahwa bahasa adalah cermin kebudayaan. Di Republik Indonesia terdapat berbagai bahasa daerah dengan tradisi sastra dan berbagai wujud budaya lainnya. Tetapi, bagaimanakah kehidupan bahasa, sastra, dan budaya daerah saat ini? Seiring dengan kemajuan jaman dan terbukanya komunikasi global

maka kehidupan bahasa, sastra, dan budaya daerah di Indonesia mengalami kemunduran. Kemunduran itu dapat dilihat pada kehidupan masyarakat kita pada masa kini yang mengedepankan pemenuhan kebutuhan kehidupan politik dan ekonominya. Segala sesuatu yang berkaitan dengan budaya dipandang sebagai sesuatu yang hanya sebagai sampingan tanpa memerlukan pemikiran yang serius. Sebagai contoh, kehidupan sekarang perlu dukungan kemajuan teknologi yang canggih, dan untuk mengikutinya diperlukan bahasa asal teknologi canggih tersebut bukan bahasa daerah secara sadar atau tidak bahasa daerahnya telah ditinggalkannya, dan dipelajarilah bahasa sumber teknologi tersebut sebagai sesuatu yang lebih menjanjikan secara ekonomis maupun politis bagi kehidupannya. Hal ini seiring dengan luncuran pertanyaan-pertanyaan Poedjosoedarma (2001) "Apakah kebudayaan dan bahasa daerah memang sebaiknya dilupakan saja? Bukankah sementara orang menganggap bahwa kebudayaan dan bahasa daerah itu kolot dan tidak mempunyai kemungkinan untuk maju? Jadi tak apalah kalau punah, atau biarlah kebudayaan dan bahasa daerah itu dipelihara orang-orang yang sudah tua, atau biar dihayati oleh rakyat gembel yang statis-kolot dan tinggal di pedesaan. Sementara itu yang urban, yang terdidik, yang berjiwa muda, yang melek politik, ikut menjadi penerus pendiri dan penegak bangsa, ikut mengusahakan majunya bangsa, dan ikut menjadi penganjur dipakainya bahasa Indonesia saja?"

Bila direnungkan, mengikuti kemajuan jaman dan berakibat mundurnya bahasa dan budaya daerah memang menguntungkan. Kemungkinan dicapainya bahasa dan budaya Indonesia dan asing segera dapat berhasil. Pencapaian ini didukung oleh kurikulum sekolah yang menyediakan waktu lebih banyak pada pengajaran bahasa Indonesia, bahasa asing, IPS, IPA, dan bahasa daerah cukup diajarkan di SD dan SLTP dengan waktu yang sangat minim. Hal ini mungkin berkaitan dengan kebijakan pemerintah selama orde baru yang lebih menonjolkan peran pemerintah, bersifat sentralistik dengan menempatkan hubungan kebudayaan nasional dengan kebudayaan lokal di daerah dalam bentuk

roda. Kebudayaan nasional sebagai pusat, dan kebudayaan lokal sebagai pinggirannya, yang memiliki ikatan satu arah, yang memiliki hubungan menentukan dan menerima, bukan hubungan saling mempengaruhi. Hubungan budaya daerah hanya sebagai penerima pengaruh dari pusat dan tidak memiliki hubungan dengan budaya daerah lainnya.

Akibat hubungan kebudayaan nasional dan daerah bersifat satu arah, dan budaya daerah hanya sebagai pinggirannya yang tidak ada hubungan dengan budaya daerah lainnya dapat dikaitkan dengan kenyataan yang ada di Indonesia saat ini, yakni terjadinya benturan-benturan antar suku, antargolongan, antarkesatuan, antargolongan, antarkesatuan, jatuhnya banyak korban, baik korban yang bersifat fisik maupun nonfisik. Adanya benturan-benturan itu akan menghambat kegiatan keseharian yang menyangkut kepentingan pendidikan, sosial kemasyarakatan, keamanan, kecemasan, dll. Melihat kenyataan-kenyataan demikian di negeri ini perlu diupayakan penyamaan sudut pandang terhadap kondisi yang tidak berkentuan dan jalan keluarnya. Dalam artikel ini dicoba untuk dirumuskan penyamaan sudut pandang dan jalan keluar yang dapat digunakan sebagai sarana pemerkokoh kesatuan Indonesia.

B. Komunikasi, Bahasa, dan Budaya

Komunikasi itu minimal harus mengandung kesamaan makna antara dua pihak yang terlibat yakni kegiatan komunikasi informatif, agar orang lain mengerti dan tahu, dan persuasif, agar orang lain bersedia menerima suatu paham atau keyakinan, melakukan suatu paham atau keyakinan (Effendy, 1995:9). Komunikasi ada di mana-mana dan dalam segala kesempatan. Dengan komunikasi kita dapat membentuk saling pengertian, menumbuhkan persahabatan, memelihara kasih sayang, menyebarkan pengetahuan, dan melestarikan peradaban. Sebaliknya, dengan komunikasi kita juga dapat menyuburkan perpecahan, menghidupkan permusuhan, menanamkan kebencian, merintangki kemajuan, dan menghambat pemikiran

(Rakhmat, 1986).

Berdasarkan prosesnya, komunikasi dapat dibedakan menjadi dua yakni komunikasi primer dan komunikasi sekunder. Komunikasi primer adalah komunikasi yang menggunakan simbol (verbal - nonverbal) dan komunikasi sekunder adalah komunikasi yang menggunakan sarana atau alat sebagai medianya (surat, telepon, media masa cetak elektronik, dsb). Penggunaan simbol dan alat atau sarana dapat menimbulkan berbagai macam pemikiran, kejadian, baik positif maupun negatif di masyarakat.

Masyarakat Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa dengan berbagai bahasa dan budayanya. Masyarakat Indonesia memiliki bahasa nasional (bahasa Indonesia) dan berbagai bahasa daerah (misalnya. Jawa, Sunda, Padang, Batak), serta bahasa Inggris sebagai bahasa internasionalnya. Peran bahasa yang utama adalah sebagai sarana berkomunikasi, peran lain yang tidak kalah penting adalah sebagai perekam kebudayaan sekaligus sebagai buah kebudayaan. Bahasa sebagai buah kebudayaan dianggap sebagai lambang kebanggaan bangsa, sebagai perekat hubungan bangsa, lambang persatuan, dan lambang identitas. Bila dilihat dari berbagai bahasa daerah yang ada di Indonesia tentunya akan terdapat berbagai budaya juga yang berhasil direkamnya yang menjadikan bahasanya sebagai yang dibanggakan, sebagai identitas dan sebagainya yang tentunya berkait erat dengan budayanya.

Budaya dapat diartikan sebagai perangkat simbol yang digunakan oleh masyarakat untuk menghadapi lingkungannya (Putra, 2000). Simbol dapat berupa sesuatu yang konkret seperti peralatan teknologi; yang agak konkret misalnya perilaku, tindakan; dan sesuatu yang abstrak, yang tidak terlihat seperti ide-ide dan pengetahuan. Selain fungsi utama simbol sebagai sarana beradaptasi dengan lingkungannya, simbol berkait erat dengan perasaan. Yang dimaksud lingkungan di sini tidak hanya lingkungan alam, tetapi juga lingkungan sosialnya. Untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan tersebut perlu diingat pula tentang

pranata sosial yang menjadi panutan masyarakat. Pranata sosial itu menyangkut keperluan hidup kekerabatan, mata pencaharian, pendidikan, pengetahuan, keindahan dan rekreasi, hubungan manusia dengan Sang pencipta, mengelola keseimbangan kekuasaan dalam kehidupan masyarakat, dan pemenuhan keperluan fisik dan kenyamanan hidup (Koentjaraningrat, 1990: 162-170). Pranata sosial ini sangat diperlukan oleh masyarakat agar kehidupan masyarakatnya dapat berjalan dengan baik, dan tidak terjadi konflik. Pranata sosial tersebut mencakup hal-hal berikut ini.

- 1) Pranata yang berfungsi untuk memenuhi keperluan hidup kekerabatan (*domestic institutions*), misalnya perkawinan, tolong-menolong antar kerabat;
- 2) Pranata yang berfungsi untuk memenuhi keperluan matapencaharian hidup, menyimpan dan mendistribusikan hasil produksi (*economic institutions*), misalnya pertanian, peternakan, koperasi, perbankan;
- 3) Pranata yang berfungsi untuk memenuhi keperluan pendidikan manusia agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna (*educational institutions*) misalnya, pengasuhan anak-anak, pendidikan menengah, pendidikan tinggi;
- 4) Pranata yang berfungsi untuk memenuhi keperluan ilmiah manusia, menyelami alam semesta sekelilingnya (*scientific institutions*), misalnya penelitian ilmiah;
- 5) Pranata yang berfungsi memenuhi keperluan manusia dalam menghayatkan rasa keindahan dan rekreasi (*aesthetic and recreational institutions*), misalnya seni rupa, seni tari, seni suara, kesusastraan, olah raga;
- 6) Pranata yang berfungsi memenuhi keperluan manusia untuk berhubungan dengan dan berakti kepada Tuhan atau dengan alam gaib (*religion institutions*), seperti kenduri, upacara, penyiaran agama, doa;
- 7) Pranata yang berfungsi memenuhi keperluan manusia untuk

mengatur dan mengelola keseimbangan kekuasaan dalam kehidupan masyarakat (*political institutions*) seperti pemerintahan, demokrasi, kepartaian;

- 8) Pranata yang berfungsi memenuhi keperluan fisik dan kenyamanan hidup manusia (*somatic institutions*), seperti pemeliharaan kecantikan, pemeliharaan kesehatan, kedokteran.

Pranata sosial tersebut tentunya kurang lengkap, mengingat kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Kompleksitas masyarakat tersebut memerlukan pranata-pranata baru untuk memenuhi kebutuhan kehidupan masyarakatnya, misalnya masyarakat Indonesia yang berada pada masa transisi dari masyarakat yang agraris ke masyarakat industrial.

Dari pembicaraan tentang komunikasi, bahasa, dan budaya ini dapat ditarik suatu garis bahwa dari ketiganya bahwa simbol sangat berperan dalam kehidupan manusia. Pranata sosial yang berlandaskan pada budaya yang memanfaatkan simbol sebagai sarana beradaptasi dengan lingkungannya memerlukan ungkapan-ungkapan yang dapat mengkomunikasikan ide-ide, perilaku, cita-cita dan pengetahuan kepada sesama kelompoknya atau kelompok lainnya. Dilihat bahwa negara Indonesia ini terdiri atas berbagai kelompok suku bangsa dan berbagai ragam budayanya diperlukan adanya komunikasi lintas budaya, dengan dilandasi adanya penyamaan sudut pandang dan jalan keluarnya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

C. Bersatu dalam Kerjasama, Berkarya dalam Keragaman

Bangsa Indonesia yang ada saat ini adalah suatu bangsa yang terdiri atas berbagai suku bangsa dengan berbagai bahasanya. Meskipun banyak juga yang semula berasal dari tempat lain, secara turun-temurun telah tinggal di wilayah Indonesia, dan merasa Indonesia adalah tanah airnya. Bangsa ini terbentuk karena suatu kemauan untuk menyatukan diri dan dengan itu membangun sebuah negara serta membebaskan diri dari segala bentuk penjajahan dari bangsa lain.

Kenyataan yang ada saat ini seolah kemauan untuk membangun sebuah negara dan membebaskan diri dari segala bentuk penjajahan agaknya sulit dicapai. Hal ini terbukti dengan maraknya benturan-benturan yang ada saat ini, berbagai kejahatan, bentrokan antarwarga, dan kenakalan remaja yang menandakan kurangnya perasaan untuk bersatu dan membangun negara kesatuan republik ini boleh dikatakan mulai luntur. Mengapa bisa terjadi demikian? Benturan-benturan yang terjadi, baik yang halus maupun yang kasar, dapat disebabkan oleh perbedaan-perbedaan landasan yang berbeda dalam menganggap sesuatu itu benar, baik dari segi agama, ras, dan suku.

Menurut sejarahnya, kehidupan masa-masa lalu maupun masa sekarang (2-4 generasi) suku-suku bangsa di Indonesia ini telah terbiasa dengan kehidupan dengan suku atau bangsa lain. Hal ini terlihat dari banyaknya peninggalan-peninggalan sejarah yang menunjukkan adanya hubungan baik dengan suku lain tersebut. Sebaliknya, ada pula hubungan yang kurang baik terjadi antarmasing-masing suku berupa perselisihan-perselisihan.

Pengalaman sejarah dalam kaitannya dengan antarsuku bangsa tersebut seharusnya menumbuhkan kearifan kepada bangsa Indonesia kini yang memiliki kesadaran sejarah. Keterampilan-keterampilan yang berkaitan dengan pergaulan lintas bangsa perlu dipertahankan dan dikembangkan, sedangkan perseteruan-perseteruan perlu disikapi dengan pemikiran yang menjadi suatu toleransi persahabatan. Kesadaran untuk mempertahankan dan mengembangkan warisan budaya itu sangat diperlukan upaya pencapaiannya.

Pencapaian pertahanan dan pengembangan warisan budaya itu dapat dimulai dengan mengupas dualisme yang ada di dalam kehidupan bangsa ini, di satu sisi warisan budaya sering dibicarakan, dipuji, dirayakan. Di sisi lainnya, pada kenyataan sehari-hari, dalam mengatasi segala macam masalah dipergunakan jalur ilmu pengetahuan yang mengikuti cara berpikir barat, sehingga warisan budaya sekedar menjadi tontonan bagi turis atau rekreasi saja. Untuk itu perlu diupayakan agar

orang dapat hidup dengan orang lainnya dalam kerangka dualisme yang baik, artinya, dia dapat hidup berdampingan dengan orang lainnya dari suku bangsa lain dalam kerangka keindonesiaan tanpa harus mengorbankan warisan budaya daerahnya.

Upaya agar seorang warga Indonesia dalam kehidupannya dapat tetap hidup pada budaya sukunya yang kuat tetapi pada kesempatan yang sama ia juga menjadi pendukung budaya Indonesia dengan usaha untuk mengangkat kembali warisan budaya berpikir ke arah kesadaran. Kekhasan berpikir warisan budaya itu berujud ajaran kebijaksanaan bagi kehidupan yang dipercayai sebagai benar. Ajaran-ajaran itu harus didekati secara metodis dan kritis, dengan mengambil jarak, dengan kepala dingin dan semangat analitis (Magnis-Susena, 1995). Dengan niat dasar mendudahi warisan budaya dengan semangat analitis tersebut tentu keinginan agar kebudayaan suku bangsa dapat berjalan seiring dengan kebudayaan Indonesia, sesuai dengan tuntutan perkembangan masing-masing akan dapat dicapai dengan lancar. Keduanya tidak perlu dipertentangkan. Masing-masing budaya suku bangsa dapat saling menerima dan saling memberi untuk keberlangsungan kehidupan bersama. Untuk keperluan ini bahasa daerah dapat dijadikan sarana untuk menanamkan budaya daerahnya.

Sebagai usaha pencapaian mendekati warisan budaya termasuk di dalamnya bahasa dan sastranya, pada Dialog Nasional 20 Maret 2002 di UNY dengan peserta dari berbagai instansi yang terkait dan dari utusan PT dari Jawa dan luar Jawa telah merumuskan tindakan pembinaan bahasa, sastra, dan budaya daerah yang dibedakan dua sasaran yang berkaitan, yakni pembinaan di masyarakat dan di sekolah, yang meliputi identifikasi permasalahan, dukungan dan potensi bahasa, sastra dan budaya daerah; peningkatan intensitas pembinaannya; penelitian misalnya penelitian studi kelayakan bahasa daerah sebagai mata pelajaran di SMU; dan pemantapan program kurikulum muatan lokal. Untuk keperluan itu, perlu difasilitasi hal-hal yang berkaitan dengan bahasa, sastra dan budaya daerah, terutama di sekolah-

sekolah, yang pada gilirannya para remaja sebagai penerus bangsa tidak akan kehilangan identitas daerahnya sebagai unsur identitas bangsanya.

Dari ulasan di atas, dapat tarik suatu pernyataan bahwa agar kita sebagai bangsa Indonesia tidak hidup dalam dualisme yang tidak menguntungkan bagi kehidupan kita diperlukan pedoman bagaimana kita sebagai bangsa Indonesia dapat hidup di antara saudara se-suku sekaligus kita juga dapat hidup berdampingan dengan saudara yang berasal dari lain suku. Pedoman atau dapat dikatakan sebagai penyemangat hidup kita adalah **“bersatu dalam kerjasama berkarya dalam keragaman”** (Pradipto, 2002). Penyemangat ini memiliki makna bahwa **kita sebagai manusia mengakui adanya perbedaan dan dalam perbedaan tersebut terdapat kesamaan**. Bahwa, dalam kehidupan ini kebenaran tidak hanya satu tetapi dapat berbagai ragam sesuai dengan sudut pandang masing-masing. Ajaran kebenaran di masing-masing budaya daerah tentu memiliki kekhasan dan caranya sendiri, tentunya juga pada ajaran-ajaran yang lainnya.

D. Penerapan Prinsip Rukun dan Prinsip Hormat untuk Menghindari Konflik

Pada paparan di atas telah dikatakan bahwa saat sekarang sering terjadi benturan-benturan yang disebabkan oleh berbagai hal, misalnya agama, ras, suku dan sebagainya. Untuk itu perlu diadakan penyamaan sudut pandang terhadap situasi kondisi yang timbul saat ini, yakni dengan adanya komunikasi lintas budaya dengan penyemangat bekerja bersatu dalam kerjasama, berkarya dalam keragaman. Bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa dengan berbagai bahasa daerahnya akan dapat hidup berdampingan sebagai manusia yang dualisme yakni dapat hidup diantara saudara se suku bangsa dengan baik dan sekaligus dapat hidup berdampingan dengan saudara yang berasal dari lain suku sebagai sesama warga Indonesia. Bila dikaitkan dengan kajian bahasa daerah yang berbagai macam di Indonesia ini maka kita akan sampai pada kesadaran kenyataan tentang keberagaman,

kemajemukan atau pluralitas bahasa-bahasa di Indonesia ini. Kajian tentang hubungan kekerabatan antarbahasa ini yang dapat membawa para pemakainya kepada saling memahami, saling menghargai dan menghormati (Djawanai, 2002: 9-10). Keanekaragaman bahasa ini mencerminkan pengalaman sejarah yang berbeda, namun semesta bahasa dan kesamaan-kesamaannya mencerminkan kesatuan kejiwaan yang membawa kepada kesadaran pentingnya berbahasa. Kesadaran berhubungan dengan bahasa sebagai mekanisme yang mengatur tingkah laku manusia dalam pengalaman hidup bermasyarakat (sosial). Dengan bahasa manusia dapat berkomunikasi dengan manusia lainnya, baik yang menyebabkan kebersamaan ataupun perseteruan atau konflik, yang sebenarnya sudah merupakan suatu konsekuensi bagi masyarakat majemuk seperti Indonesia. Kemajemukan tersebut sudah ada sejak jaman dulu kala. Untuk dapat hidup berdampingan dengan suku lain yang ditunjukkan dengan adanya berbagai macam bahasa daerah seperti disebutkan di atas perlu diterapkan prinsip kerukunan dan prinsip hormat.

Prinsip kerukunan dan prinsip hormat menurut Geertz (1982) merupakan dua kaidah yang sangat menentukan pergaulan, yaitu dalam setiap pergaulan dalam masyarakat Jawa. Prinsip kerukunan merupakan manifestasi dari suatu tindakan bahwa dalam setiap situasi manusia dituntut sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan konflik, dan menuntut supaya manusia dalam berkata dan membawa diri selalu menunjukkan sikap hormat terhadap orang lain, sesuai dengan derajat dan kedudukannya. Menurut Magnis Susena (1985: 38-62) prinsip kerukunan dan prinsip hormat merupakan norma yang sangat menentukan semua bentuk konkret hubungan atau komunikasi. Prinsip kerukunan bertujuan untuk mempertahankan masyarakat dalam keadaan harmonis. Prinsip kerukunan menitikberatkan pada pencegahan jangan sampai terjadi ketegangan jangan sampai mengganggu keselarasan. Adapun prinsip hormat dapat diartikan bahwa setiap orang dalam cara bicara dan membawa diri selalu harus menunjukkan sikap hormat

terhadap orang lain, sesuai dengan derajat dan kedudukannya. Mungkin penerapan prinsip kerukunan dan prinsip hormat inilah maka orang Jawa dapat hidup berdampingan dengan suku lain secara harmonis.

Kehidupan orang Jawa dengan suku lain dapat hidup berdampingan ini dapat ditunjukkan dengan adanya hasil penelitian yang diadakan di Daerah Istimewa Yogyakarta, yang notabene daerah ini dapat dikatakan sebagai Indonesia mini. Sifat rukun masyarakat Jawa, hakekatnya bertujuan untuk mempertahankan kehidupan kemasyarakatan dalam kondisi yang harmonis. Rukun diartikan sebagai suatu usaha menghilangkan ketegangan dalam kehidupan bermasyarakat sehingga interaksi sosial akan tetap kelihatan searas dan harmonis. Prinsip kerukunan dalam masyarakat Jawa merupakan penunjang manusia dalam berinteraksi dengan manusia lain yang bersifat menyeluruh (Sadilah, 1998: 33 - 34). Berlaku rukun dalam masyarakat Jawa dapat diperlihatkan dengan bentuk aktivitas gotong royong dalam segala bidang, misalnya dalam pembuatan rumah, perhelatan, pembangunan saluran irigasi. Mungkin karena sifat rukun yang digunakan untuk menjaga keharmonisan inilah orang Jawa dapat diterima oleh suku lain dan tidak menimbulkan iri hati.

Penerapan prinsip hormat didasarkan pada pandangan bahwa semua hubungan dalam masyarakat teratur secara hirarkhis, bahwa keteraturan hirarkhis itu bernilai pada dirinya sendiri dan oleh karena itu orang wajib untuk mempertahankannya dan membawa diri sesuai dengannya. Pandangan itu sendiri berdasarkan cita-cita tentang suatu masyarakat yang teratur baik, di mana setiap orang mengenal tempat dan tugasnya dan dengan demikian ikut menjaga agar seluruh masyarakat merupakan suatu kesatuan yang selaras (Susena, 1985: 60). Pada prinsip hormat ini pimpinan atau yang berkedudukan lebih tinggi diberi hormat, dan bagi yang lebih rendah kedudukannya pimpinan bersikap sebagai keibuan atau keibuan dan tanggung jawab.

Prinsip rukun dan hormat dari masyarakat Jawa yang diterapkan dalam usaha untuk menapaki kehidupan bermasyarakat baik dengan

sesuku ataupun dengan suku lain akan menyebabkan terjadinya kehidupan yang harmonis atau tidak ada konflik antar suku. Terjadinya konflik antar suku menurut Koentjaraningrat (1997) pada dasarnya disebabkan oleh adanya persaingan untuk dalam hal mendapatkan sumber penghidupan, adanya pemaksaan kehendak, fanatisme, adanya keinginan mendominasi suku lain. Adanya konflik terpendam dalam hubungan antara suku bangsa yang telah bermusuhan secara adat. Jadi, pada dasarnya hubungan antar suku tidaklah mengkhawatirkan untuk timbulnya suatu konflik karena pada dasarnya pada suku bangsa itu memiliki potensi untuk bekerjasama dalam bidang sosial ekonomis, kalau mereka masing-masing bisa mendapatkan lapangan mata pencaharian hidup yang berbeda dan saling melengkapi. Dalam keadaan saling membutuhkan itu akan berkembang suatu harmoni.

E. Penutup

Dalam mewujudkan impian warga Indonesia dapat hidup dalam kedamaian sebagai warga satu suku bangsa yang kuat berlandaskan budayanya, dan sekaligus dapat hidup sebagai pendukung budaya Indonesia berdampingan dengan warga suku lainnya diperlukan tindakan konkrit dengan pembinaan bahasa, sastra dan budaya daerah secara proporsional. Kegiatan-kegiatan kebahasaan yang melibatkan bahasa-bahasa daerah nusantara, perlu digali dan dianalisis ungkapan-ungkapan tradisional yang banyak menyimpan warisan nilai-nilai budaya berkenaan dengan sikap hidup, etika, pola pikir, dan sebagainya yang kesemuanya antara lain dapat dipelajari lewat bahasa daerahnya. Masing-masing daerah memiliki keunggulan dan kekurangannya. Dengan adanya komunikasi dengan dilandasi prinsip rukun dan hormat, bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai suku dapat saling menerima keunggulan dan kekurangan masing-masing suku bangsanya untuk kebaikan bersama, niscaya kehidupan bangsa Indonesia ini tidak akan berbenturan satu dengan yang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Effendy, Onong Uchjana. 1995. *Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Geertz, Hildred. 1982. *Keluarga Jawa*. Jakarta: Grafiti Pers.
- Haryono, Timbul. 2002. "Peran Budaya Lokal dalam Pranata Sosial". Dalam *Budaya Lokal dalam Era Desentralisasi (Konsep, Politik dan Strategi Kebudayaan)* di PPG Matematika, 5-6 Agustus 2002. Yogyakarta: Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata, balai kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta, Proyek Pemanfaatan Kebudayaan Daerah Propinsi daerah Istimewa Yogyakarta.
- Herusatoto, Budiono. 2001. *Symbolisme dalam Budaya Jawa*. Yogyakarta: Hanindita Graha.
- Koentjaraningrat. 1990. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Magnis-Susena, Frans. 1985. *Etika Jawa: Sebuah Analisa Falsafi tentang Kebijaksanaan Hidup Jawa*. Jakarta: PT Gramedia.
- _____. 1995. *Filsafat Kebudayaan Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Pradipta, Budya. 2002. "Mawayu Hayuning Bawana". dalam *Dialog Nasional dan Temu Ilmiah XBKS 19-20 Maret 2002*. Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Bahasa Daerah Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta. Poedjosoedarmo, Soepomo. 2001. "Bahasa dan Pluralisme Budaya". Yogyakarta: Fakultas bahasa dan Seni UNY.
- Putra, Heddy Shri Ahimsa. 2002. "Potensi Budaya Lokal sebagai Sumber Penataan Sosial". Dalam *Budaya Lokal dalam Era Desentralisasi (Konsep, Politik dan Strategi Kebudayaan)* di PPG Matematika, 5-6 Agustus 2002. Yogyakarta: Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata, balai kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta, Proyek Pemanfaatan

- Kebudayaan Daerah Propinsi daerah Istimewa Yogyakarta.
- Rakhmat, Jalaluddin. 1986. *Psikologi Komunikasi*. Bandung: Remaja Karya VC Bandung.
- Sadilah, Emiliana, dkk. 1998. *Integrasi Nasional: Suatu Pendekatan Budaya di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan bagian Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Sedyawati, Edi. 2001. "Membangun Minat Anjongsana Budaya Keharusan dalam Masyarakat Indonesia yang Multikultural". Yogyakarta: Fakultas Bahasa dan Seni UNY.
- Sumijati, AS. dkk. (ed) 2001. *Manusia dan Dinamika Budaya*. Yogyakarta: Fakultas Sastra UGM Bekerjasama dengan BIGRAF Publishing.
- Sumijati, AS, dkk. (ed) 2002. *Integrasi Moral Bangsa, dan Perubahan*. Yogyakarta: Fakultas Sastra UGM Bekerjasama dengan BIGRAF Publishing.
- Susanto, Budi. 2003. "Jati Diri dan Krisis Budaya Dikaji Ulang" Makalah yang disampaikan dalam *Dialog Budaya: Revitalisasi dan Reinvensi Budaya Lokal dalam Upaya Membangun dan Memperkokoh Jatidiri bangsa*. Balai kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta Proyek Pemanfaatan Kebudayaan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, PPPG Matematika, 8 9 September 2003.